

Judul : Transformasi industri hijau, komisi VII: industri kita sudah berubah
Tanggal : Selasa, 03 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Transformasi Industri Hijau Komisi VII: Industri Kita Sudah Berubah



Novita Hardini

ANGGOTA Komisi VII DPR Novita Hardini menilai, keberhasilan transformasi industri hijau tidak bisa diukur semata dari efisiensi energi atau capaian produksi. Transformasi itu harus dilihat dari kemampuan industri bertahan di tengah krisis global, menjaga lingkungan, dan menciptakan keadilan ekonomi.

Menurut Novita, perubahan struktural di sektor industri jadi kebutuhan mendesak di tengah tekanan ekonomi internasional yang semakin kompleks. Tanpa langkah serius, industri nasional berisiko kehilangan daya saing dan mengalami stagnasi berkepanjangan.

"Kalau tidak berani berubah sekarang, industri nasional bukan hanya kalah bersaing, tetapi bisa tergilas oleh krisis global," kata Novita dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).

Politikus PDIP itu bilang, meningkatnya ketidakpastian global menekan sektor industri dalam negeri. Pelemahan nilai tukar rupiah, lonjakan harga energi, serta ketegangan geopolitik menjadi kombinasi ancaman bagi keberlanjutan usaha.

Tekanan itu dirasakan langsung pelaku industri di berbagai level bahkan telah menjalar ke tingkat rumah tangga dan sektor pertanian. "Kenaikan harga energi berdampak langsung pada biaya produksi. Tanpa transformasi serius dan

berkelanjutan, industri nasional berisiko stagnan bahkan tergerus krisis global," ujarnya.

Dia mengingatkan, konsep industri hijau tidak boleh berhenti pada simbol atau penggantian sumber listrik semata. Transformasi harus menyentuh tata kelola produksi secara menyeluruh, karena green industry bukan cuma soal panel surya.

"Transformasi harus menyentuh manajemen limbah, perlindungan ekosistem, efisiensi sumber daya, dan dampak nyata bagi lingkungan sekitar. Jika tidak, konsep hijau hanya jadi jargon," tegasnya.

Novita juga menyoroti pentingnya keadilan ekonomi dalam ekosistem industri. Perusahaan besar tidak boleh bergerak eksklusif tanpa melibatkan pelaku usaha kecil. Itu sejalan dengan semangat Astacita Presiden Prabowo Subianto tentang kemandirian dan kedaulatan pangan. "Industri besar tidak boleh berjalan sendiri. Harus ada ruang kolaborasi nyata bagi UMKM dan usaha mikro," kata legislator asal Dapil Jatim VII itu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim menambahkan, seluruh sektor industri mesti mengadopsi konsep industri hijau. Penerapan prinsip ramah lingkungan harus berjalan seiring dengan peningkatan daya saing produk karena transisi itu krusial bagi masa depan ekonomi nasional.

Menurut politikus PKB itu, industri hijau bukan hanya tuntutan moral, tapi juga kebutuhan pasar global. Produk yang berkelanjutan akan lebih mudah diterima di pasar internasional. Selain itu, praktik ramah lingkungan juga memperkuat citra Indonesia di mata dunia. "Hal ini secara langsung akan berkontribusi pada peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar internasional yang kompetitif," ujarnya. ■ BSH